

**POINTER BAHAN PEMBAHASAN LKPJ BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG - SELASA, 25 MEI 2021**

1. RENSTRA BIRO PEREKONOMIAN TAHUN 2019-2024

Mengacu pada Visi “Rakyat Lampung Berjaya” dan 6 (enam) Misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, **BIRO PEREKONOMIAN** sebagai unsur Penunjang Pemerintahan urusan Perekonomian mendukung pencapaian Misi ke- 2 yaitu “Mewujudkan *good governance* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik” dengan Sasaran RPJMD yaitu “Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”.

Gambar 1.1 : Indikator Kinerja Biro Perekonomian 2019-2024



MISI II

**“Mewujudkan ‘Good Governance’ untuk
Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan
Pelayanan Publik”**

SASARAN

**Meningkatnya Peran Kebijakan Daerah dalam
rangka Peningkatan Kualitas Kinerja
Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan hal tersebut, Biro Perekonomian menetapkan **TUJUAN** Renstra, yaitu “**Tercapainya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Dilingkup Sekretariat Daerah**” dengan **1 (satu) SASARAN**, dan **1 (satu) INDIKATOR SASARAN** jangka menengah yang dijabarkan pada Tabel berikut

Tabel 1.1; Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatkan Peran Kebijakan Daerah untuk Mewujudkan efektivitas Tata Kelola Pemerintahan	1) Meningkatnya Peran Kebijakan Daerah dalam Peningkatan Kualitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Perumusan Kebijakan Umum, Koordinasi, Supervisi, Pembinaan dan Pengendalian Bidang Perekonomian	100%	100%	100%	100%	100%

Keterangan: Terdapat 1 (satu) SASARAN dan 1 (satu) INDIKATOR SASARAN

POHON KINERJA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Misi 2 : Mewujudkan “Good Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik

Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Nilai Reformasi Birokrasi (A)

SASARAN : Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat

Tujuan OPD : Mewujudkan Kebijakan Daerah dalam Menjaga Stabilitas Perekonomian Daerah

Indikator : Standar Kepuasan Masyarakat Lingkup Sekretariat Daerah

Sasaran OPD : Meningkatnya Keselarasan Kebijakan Daerah dalam peningkatan kualitas Kinerja OPD Bidang Ekonomi
Indikator : Persentase Perumusan Kebijakan Umum, Koordinasi, Supervisi, Pembinaan dan Pengendalian Bidang Perekonomian



1. Meningkatnya keselarasan kebijakan sektor ekonomi

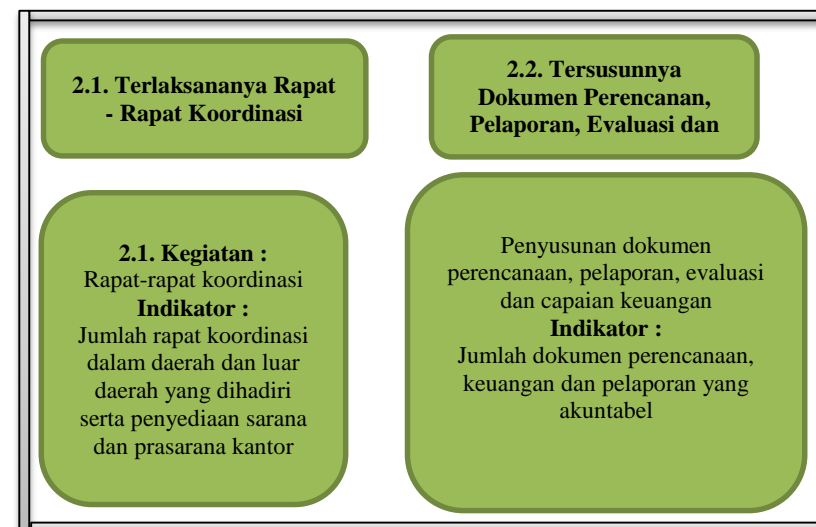
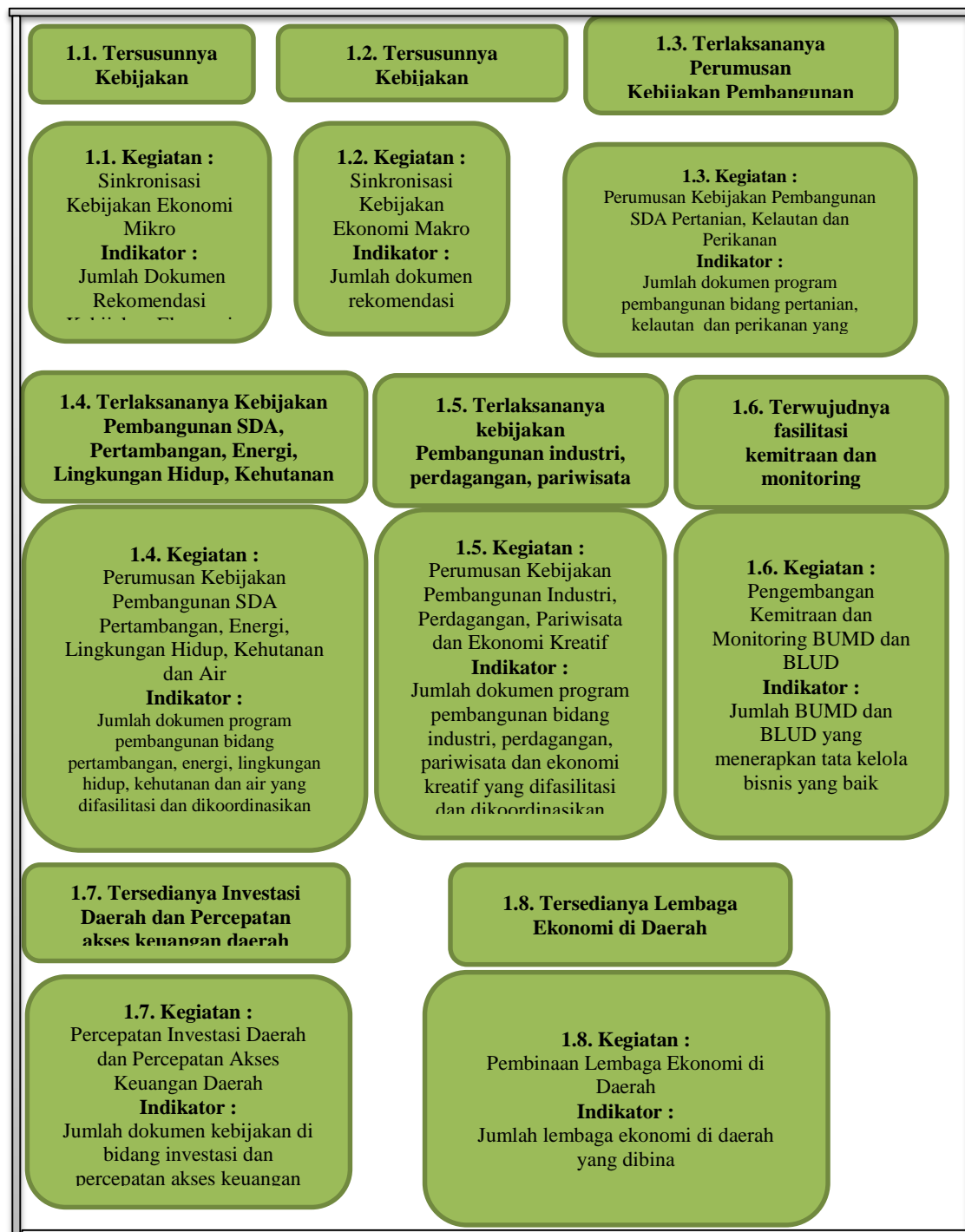
1. Program :
Koordinasi Peningkatan Perekonomian Daerah
Indikator :
Persentase Kebijakan Sektor Ekonomi yang Ditindaklanjuti



2. Terlaksananya koordinasi kebijakan dan usulan langkah langkah Kebijakan bidang perekonomian

2. Program :
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator :
Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu





Pohon Kinerja Biro Perekonomian

1 (satu) Sasaran, 2 (dua) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan

2. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Dalam rangka mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2020

Biro Perekonomian melaksanakan **2 Program** dan **10 Kegiatan** dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. **2.907.530.665,-** yang terdiri dari :

- **Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 2.907.530.665,-**
Total Rp. 2.907.530.665,-

Adapun Realisasi Keuangan pada tahun 2020 dirangkum sebagai berikut :

- **Realisasi BL adalah 89,58 % atau sebesar Rp. 2.604.531.275,-**
- **Dengan realisasi anggaran tersebut, capaian Biro Perekonomian secara umum adalah sebesar 89,58 %.**

KODE REK	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN			
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)
1	2	3	4	5	6
	BELANJA LANGSUNG				
59	Program Koordinasi Peningkatan Perekonomian Daerah				
59.19	Sinkronisasi Kebijakan Ekonomi Makro	100.639.500	88.222.500	87,66	2.417.000
59.20	Sinkronisasi Kebijakan Ekonomi Mikro	110.486.000	108.533.000	98,23	1.953.000
59.21	Perumusan Kebijakan Pembangunan SDA Pertanian, Kelautan dan Perikanan	256.819.000	240.705.234	93,73	16.113.766
59.22	Perumusan Kebijakan Pembangunan SDA Pertambangan, Energi, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Air	106.820.600	106.352.000	99,56	468.600
59.23	Perumusan Kebijakan Pembangunan Industri, Perdagangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	223.347.400	191.151.600	85,58	32.195.800
59.25	Percepatan Investasi Daerah dan Percepatan Akses Keuangan Daerah	163.847.500	151.325.325	92,36	12.522.175
59.26	Pembinaan Lembaga Ekonomi di Daerah	254.245.500	197.855.250	77,82	56.390.250
75	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Perekonomian				
75.01	Rapat-rapat Koordinasi	335.707.300	292.579.393	87,15	43.127.907
75.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Evaluasi dan Capaian Keuangan	215.512.315	204.594.132	94,93	10.918.183
	TOTAL	2.907.530.665	2.604.531.275	89,58	302.999.390

3. HAMBATAN dan UPAYA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM &

KEGIATAN HAMBATAN

Sebagai informasi penting, bahwa pada periode Tahun 2020 tengah terjadi Pandemic Covid-19 yang melanda lingkungan domestik, nasional dan global yang berpengaruh terhadap strategi, kebijakan dan regulasi yang ditempuh oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai dampaknya, terdapat beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi Biro Perekonomian Provinsi Lampung dalam melaksanakan Program dan kegiatan, antara lain :

1. Pada aspek perencanaan kegiatan, meskipun pengelola kegiatan telah menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Rencana Arus Kas (RAK) ; namun kondisi lingkungan eksternal di masa pandemic Covid-19 yang telah menghadirkan kebijakan dan regulasi yang ditempuh oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang **harus dipatuhi oleh perangkat daerah dan pelaksana kegiatan**. Secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut berdampak pada munculnya “keterbatasan” teknis operasional pelaksanaan kegiatan bagi pengelola kegiatan.. Pada aspek pelaksanaan, terdapat beberapa kegiatan yang mengalami keterlambatan *schdule* dalam pelaksanaannya. Hal tersebut sebagai dampak adanya sikap *wait and see* dari pengelola kegiatan, seiring dengan dinamika da kebijakan yang berkembang ditengah pandemic Covid-19, dimana aspek kesehatan menjadi pertimbangan yang utama.
2. Memperhatikan kebijakan *refocussing* dan realokasi anggaran (rasionalisasi anggaran) yang ditempuh oleh pemerintah di masa pendemic, maka terdapat beberapa kegiatan yang mengalami penyesuaian (mengurangi) jumlah *output*, yang secara logis akan berpengaruh terhadap capaian dari target *output* yang telah ditetapkan.

UPAYA-UPAYA

Untuk mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Biro Perekonomian, serta dalam rangka pencapaian sasaran strategis Renstra, maka terdapat beberapa penyesuaian alokasi anggaran maupun metode dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2020, antara lain :

- Membatasi pelaksanaan perjalanan dinas (di dalam maupun ke luar provinsi), ataupun kegiatan rapat-rapat dengan memanfaatkan media teknologi informasi (virtual meeting)
- Mengurangi jumlah *output* dari kegiatan, dengan tetap mempertahankan substansi kegiatan
- Merancang skala prioritas dan re-schedule pelaksanaan kegiatan.
- Ditengah kondisi pandemic Covid-19 yang belum berakhir dan kondisi keuangan daerah yang terbatas, pengelola kegiatan senantiasa memperkuat koordinasi dan kemampuan manajerial serta kemampuan teknis; sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan substantif.

4. CAPAIAN KINERJA RENSTRA S.D. TAHUN 2020

Memperhatikan capaian kinerja Secara umum, Biro Perekonomian Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2020. Jumlah Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Biro Perekonomian Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebanyak 1 (satu) indikator sasaran.

Tabel : Capaian Indikator Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2019-2024

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Peran Kebijakan Daerah dalam Peningkatan Kualitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	%	100	100	100

BAGIAN	OUTCOME	JUDUL DOKUMEN (OUTPUT)
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan keuangan yang tepat waktu	Subbag. Analisis Ekonomi Makro
		1 Laporan Diskusi Ekonomi Triwulanan (Diskontri)
		2 Dokumen Indikator Perkembangan Ekonomi Lampung Tahun 2020
		3 Dokumen Laporan Monitoring Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2020
		Subbag. Analisis Ekonomi Mikro
		1 SK tentang TIM TPID
		2 SK tentang Pembentukan Satgas Pangan
		3 Laporan Tahunan TPID
		Subbag. Tata Usaha
		1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020
		2 Dokumen Rencana kerja Tahun 2020
		3 Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020
		4 Dokumen Evaluasi Renja Triwulanan Tahun 2020
		5 Dokumen Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2020
		6 Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)
BAGIAN SDA PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatkan produksi berbagai komunitas Pertanian	Subbag. SDA Pertanian, Kelautan dan Perikanan
	Terhimpunnya Database Pertanian Rumusan Kebijakan dan Kelancaran Implementasi Lingkup Pertanian Melalui Aplikasi KPB dapat menguraikan permasalahan Pertanian	1 Peraturan Gubernur Program Kartu Petani Berjaya (KPB)
		2 Peraturan Gubernur Penugasan Wahana Raharja sebagai pengelola Kartu Petani Berjaya (KPB)
		3 Mou/ Kerjasama
		4 Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/400/B.04/HK/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kartu Petani Berjaya
		5 Pelaporan KPB dan KP3
		Subbag. SDA Pertambangan, Energi, Lingkungan Hidup Kehutanan dan Air
		1 Laporan Koordinasi Kebijakan Pembangunan SDA Pertambangan
		2 Laporan Koordinasi Kebijakan Pembangunan SDA Lingkungan Hidup
		3 Laporan Koordinasi Kebijakan Pembangunan SDA Energi
		4 Laporan Koordinasi Kebijakan Pembangunan SDA Lingkungan Hidup

		5	Laporan Koordinasi Kebijakan Pembangunan SDA Kehutanan
		6	Koordinasi Kebijakan Pembangunan Laporan SDA Air
BAGIAN	OUTCOME	JUDUL DOKUMEN (OUTPUT)	
		Subbag. Industri Pemasaran dan Ekonomi Kreatif	
		1	Laporan Koordinasi kebijakan Pembangunan Industri
		2	Laporan Koordinasi kebijakan Pembangunan Perdagangan
		3	Laporan Koordinasi kebijakan Pembangunan Pariwisata
		4	Laporan Koordinasi kebijakan Pembangunan Ekonomi Kreatif
BAGIAN BUMD DAN LEMBAGA EKONOMI	Persentase Dokumen Evaluasi BUMD dan BLUD, Lembaga Ekonomi serta Investasi dan Percepatan Akses Keuangan Daerah Tepat Waktu	Subbag. BUMD dan BLUD	
		1	PT. Wahana Raharja (BUMD)
		2	PT. Lampung Energi Berjaya (Anak Perusahaan BUMD)
		3	PT. Lampung Jasa Utama (BUMD)
		4	Laboratorium Kesehatan Daerah (Proses Pembentukan BLUD)
		5	Rumah Sakit Jiwa (BLUD)
		6	Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek (BLUD)
		Subbag. Investasi dan Percepatan Akses Keuangan Daerah	
		1	Laporan FOILA Triwulan I Tahun 2020
		2	Laporan TPKAD Triwulan II Tahun 2020
		3	Laporan TPKAD Triwulan III Tahun 2020
		3	Laporan TPKAD Triwulan IIV Tahun 2020
		4	Laporan Pendirian PPKD Jamkrida Lampung Tahun 2020
		Subbag. Lembaga Ekonomi	
		1	Bank lampung
		2	BUMDES
		3	Perbankan
		4	Dunia Usaha
		5	BUMN